UNIVERSITAS DARMA PERSADA
PERPUSTAKAAN

KEBIJAKAN DEFLASI MATSUKATA MASAYOSHI DALAM MEMAJUKAN PEREKONOMIAN JEPANG

Skripsi Sarjana ini diajukan sebagai
salah satu persyaratan mencapai gelar
Sarjana Sastra

oleh

Kartika Pomalasari Djamal
NIM: 95111093
NIRM: 953123200650090

PERPUSTAKAAN UNIV DARMA PERSADA
No Induk :
No Klas :
Subjek :
Asal :
Dan lain-lain :

JURUSAN SASTRA JEPANG
FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS DARMA PERSADA

JAKARTA
2002

UNIVERSITAS DARMA PERSADA

FAKULTAS SASTRA JEPANG

JAKARTA

LEMBAR PENGESAHAN

KEBIJAKAN DEFLASI MATSUKATA MASAYOSHI DALAM MEMAJUKAN PEREKONOMIAN JEPANG

Skripsi Sarjana Ini Diajukan Sebagai
Salah Satu Persyaratan Mencapai
Gelar Sarjana Sastra
Jurusan Asia Timur
Program Studi Bahasa dan Sastra Jepang

Telah Disahkan,
Pada hari : Senin
Tanggal : 12 Agustus 2002

Dekan Fakultas Sastra	**Ketua Jurusan Program Studi Bahasa dan Sastra Jepang**
FAKULTAS SASTRA	
Dra. Hj. Inny C. Haryono, MA	**Dra. Hj. Yulliasih Ibrahim**

UNIVERSITAS DARMA PERSADA

FAKULTAS SASTRA JEPANG

JAKARTA

LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI

Telah Diterima dan Diuji Oleh Penguji Skripsi

Pada Hari : Senin

Tanggal : 12 Agustus 2002

Jam : 14^{00} WIB

Ketua / Penguji	Pembimbing / Penguji
Dra. Tini Priantini	Prof. DR. I Ketut Surajaya, MA

Panitera / Penguji	Pembaca / Penguji
Dra. Hj. Yullasih Ibrahim	Samsul Bahri, SS

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

KEBIJAKAN DEFLASI MATSUKATA MASAYOSHI DALAM MEMAJUKAN PEREKONOMIAN JEPANG

merupakan karya ilmiah yang saya susun di bawah bimbingan Prof. Dr. I Ketut Surajaya, MA., tidak merupakan jiplakan skripsi sarjana atau karya orang lain, sebagian atau seluruhnya dan isinya sepenuhnya menjadi tangung jawab saya sendiri.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya di Jakarta, pada tanggal 12 Agustus 2002.

Kartika Pomalasari Djamal
95111093 / 953123200650090

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah. Puja dan puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, berkat rahmat-Nya penulis berhasil menyelesaikan skripsi sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Sastra.

Skripsi ini penulis selesaikan dengan berbagai kendala yang sangat membutuhkan kesabaran. Penulis tidak dapat menyelesaikannya sendiri tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Selanjutnya penulis menghaturkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Mama dan Papa yang telah berdo'a dan memberikan dorongan moril dan material.
2. Prof. DR. I Ketut Surajaya, MA selaku dosen pembimbing yang meluangkan waktu memberikan bimbingan selama penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Syamsul Bahri, SS selaku Pudek III dan Pembimbing Akademik, yang membimbing dan mendukung penulis, sehingga dapat menyelesaikan kewajiban selama di Universitas Darma Persada.
4. Ibu Dra. Tini Priantini, selaku Pudek II Fakultas Sastra dan Ketua Sidang.

5. Ibu Dra. Yuliasih Ibrahim, selaku Kajur Bahasa dan Sastra Jepang dan Panitera Sidang.
6. Ibu Nani Dewi Sunengsih, SS selaku Kepala Program Dilploma Bahasa Jepang.
7. Ibu Inny C. Haryono, MA, selaku Dekan Fakultas Sastra Universitas Darma Persada.
8. Mr. Steven J. Ericson profesor Dartmouth College University atas masukannya melalui email.
9. Kakak-kakak penulis atas segala saran, dukungan dan do'anya, juga kedua keponakan tersayang yang selalu menghibur disaat-saat penulis sedang jenuh.
10. Putri, Evi, Lia, Eci, Turiah, Rini, Tanti, Indri, Rini Utami, Lisa, Ida, dan Ndari atas dukungan, bantuan dan do'anya selama ini.
11. Perpustakaan kampus atas buku-bukunya.

Skripsi ini tentunya masih terdapat kekurangan karena kealpaan yang tidak penulis sadari dan sengaja. Penulis mengharap kritik dan saran yang membangun, sehingga skripsi ini menjadi lebih baik dan sempurna.

Penulis berharap skripsi ini bermanfaat untuk berbagai pihak yang berkepentingan, terutama penulis.

Jakarta, Juli 2002

Penulis

ABSTRAK

Dalam skripsi ini penulis membahas salah satu keputusan monumental Kebijakan Deflasi pada tahun 1881 yang diambil oleh salah seorang Menteri Keuangan yang berpengaruh dalam masa Restorasi Meiji di Jepang, Matsukata Masayoshi. Kebijakan ini telah menjadi titik kritis pada program modernisasi dan industrialisasi di Jepang.

Penulis membahas beberapa hal yang menjadi latar belakang pengambilan kebijakan tersebut dalam Bab I, yang diawali dengan terjadinya krisis ekonomi di Jepang pada masa awal Restorasi Meiji, karena kebijakan yang diambil pemerintah dalam program modernisasi dan industrialisasi pada awal Restorasi Meiji di Jepang sampai terjadinya inflasi yang merupakan beban yang harus ditanggung pemerintah.

Pembahasan mengenai tindakan-tindakan yang dilaksanakan Matsukata sebagai konsekuensi dari kebijakan deflasinya dapat dilihat pada Bab II. Bab ini membahas kebijakan-kebijakan yang diambil baik dalam skala makro ekonomi maupun dalam kerangka kerja mikro untuk mengatasi terjadinya inflasi dan

mensukseskan program modernisasi dan industrialisasi di Jepang.

Selanjutnya dalam Bab III dibahas mengenai beberapa pengaruh dengan diambilnya kebijakan deflasi dalam bidang moneter dan bidang industri, baik mambahas mengenai pengaruh positif maupun negatifnya. Pengaruh inilah yang menjadikan Jepang menjadi salah satu negara industri terkemuka di dunia saat ini.

DAFTAR ISI

Pengesahan

Pernyataan Keabsahan Judul

Kata Pengantar

Abstrak

Daftar Isi

Halaman

BAB I. PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang Sejarah 1

1.2. Permasalahan 12

1.3. Tujuan 13

1.4. Ruang Lingkup Penulisan 13

1.5. Metode Penulisan 13

1.6. Sistematika Penulisan 14

BAB II. KEBIJAKAN DEFLASI YANG DIAMBIL OLEH MENTERI KEUANGAN MATSUKATA MASAYOSHI 16

2.1. Kebijakan dalam Bidang Moneter dan Perbankan 19

2.2. Kebijakan dalam Bidang Perdagangan dan Perindustrian 29

BAB III. PENGARUH KEBIJAKAN DEFLASI YANG DIAMBIL OLEH MENTERI KEUANGAN MATSUKATA MASAYOSHI 36

3.1. Pengaruh dan hasil yang dicapai terhadap perekonomian Jepang secara makro di bidang moneter dan perbankan 38

3.2. Pengaruh dan hasil yang dicapai terhadap perekonomian Jepang secara mikro di bidang perdagangan dan perindustrian 42

3.3. Pengaruh pada Perekonomian Jangka Panjang 49

BAB IV. KESIMPULAN 51

BIBLIOGRAFI 55

KRONOLOGI 58

GLOSARI 62

Gambar Matsukata 66

Gambar Notes Selama Restorasi Meiji 68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Sejarah

Kebijakan deflasi yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Matsukata Masayoshi pada akhir tahun 1881 telah memberikan pengaruh yang besar terhadap perekonomian Jepang pada masa Restorasi Meiji. Kebijakan yang dikeluarkan Matsukata Masayoshi ini disebabkan oleh beberapa permasalahan pada periode awal atau pada pertengahan pertama masa transisi (1868 – 1876) dan periode setelah Pemberontakan Satsuma (*Seinan Senso*) sampai pengangkatannya sebagai Menteri Keuangan (1877 – 1881) yang mengakibatkan kesulitan keuangan negara, depresi ekonomi, dan inflasi.

Tujuan Restorasi Meiji adalah untuk membentuk Jepang yang modern (modernisasi Jepang). Program modernisasi ini tidak dapat dilaksanakan jika pemerintah masih menganut sistem feodal. Kemudian pada tahun 1871 pemerintah Jepang melaksanakan berbagai perubahan untuk menghapuskan rezim feodal tersebut dan menciptakan negara baru sebagai dasar dari program modernisasi pada Restorasi Meiji.

Tindakan pertama yang dilakukan Pemerintah Meiji adalah penghapusan secara legal eta (kasta pariah), penghapusan secara

legal prostitusi, larangan penggunaan pedang bagi para samurai, likuidasi hutang-hutang han (klan), menjadikan mata uang han sebagai mata uang nasional (pada saat itu setiap daerah dapat mengeluarkan mata uang), dan rencana pembayaran pelunasan uang pensiun samurai dengan *bonds* (surat berharga obligasi) dan *cash payment* (pembayaran secara tunai).

Tahap selanjutnya adalah merevisi kalender, sistem pendidikan umum dan surat perintah wajib militer, pembuatan struktur pajak atas tanah, pencabutan larangan transaksi jual beli tanah, mendirikan mercusuar dan pembangunan rel kereta api. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit.

Dengan program penghapusan sistem feodal ini, maka pemerintah harus melunasi pembayaran atas pensiunan samurai, karena daerah yang sebelumnya dikuasai *daimyo* dan samurai diganti menjadi daerah prefektur yang dipimpin oleh pegawai pemerintah yang telah ditetapkan yang disebut dengan istilah *haihan chiken*[1] (Pembatalan daerah feodal / han dan pembentukan sentralisasi sistem daerah prefektur / ken). Tahun 1873 Okuma Shigenobu (Wakil Menteri Keuangan) dan Okubo Toshimichi (Menteri Keuangan) membuat program untuk pelunasan dana pensiunan samurai dalam pembayaran secara

lump sum (dalam satu jumlah sekaligus), sebagian dalam bentuk tunai dan sebagian lagi dalam bentuk *government bonds* (surat berharga / obligasi pemerintah).

Sebagai gambaran bahwa pada masa sebelumnya yaitu pada Jaman Tokugawa samurai kelas tinggi mendapatkan jatah beras, upah, biaya hidup dan hak-hak istimewa dan samurai kelas rendah mendapat jatah beras dan upah. Namun setelah Restorasi Meiji, samurai kelas tinggi hanya mendapatkan jatah beras dari tuan tanah dan samurai kelas rendah tidak mendapatkan apa-apa.

Selanjutnya samurai tinggi dipekerjakan di pemerintahan dan jatah beras dihapuskan, mereka hanya mendapatkan upah sebagai pegawai. Samurai rendah menjadi petani atau agen ekonomi untuk modernisasi. Namun para petani ini mendapatkan masalah dengan tingginya pajak tanah dan turunnya harga beras karena terlalu banyak produksi.

Program Okuma Shigenobu dan Okubo Toshimichi tersebut diumumkan oleh para gubernur setiap daerah prefektur untuk para samurai dengan pensiun tahunan sebesar 100 *koku* atau kurang (1 *koku* = 0,18 m^3 atau 180,39 liter beras). Pemotongan ini dihitung berdasarkan masa 6 tahun pensiunan untuk pemasukan turun-temurun dan 4 tahun untuk pemasukan

---

[1] Yoshihara Kunio, Pembangunan Ekonomi Jepang (ed. II, UI-Press, 1992), hal.

seumur hidup. Selanjutnya pemerintah harus menyediakan lapangan kerja para samurai dengan merehabilitasinya untuk memulai bisnis atau bertani[2]. Permasalahan ini semakin rumit karena dalam kenyataannya pensiun masih dibayarkan dalam bentuk beras, sedangkan pajak atas tanah yang baru harus dibayar dengan tunai.

Bulan Maret 1876, Okuma Shigenobu dan Okubo Toshimichi mengusulkan pengeluaran *bonds* (surat berharga obligasi) pengganti pensiun sebagai suatu dasar. Mereka beranggapan perlunya memperbaiki sistem feodal tentang penghargaan turun-temurun yang sangat bertentangan dan sebagai penyedot utama keuangan negara. Bulan Agustus 1876, *Dajokan* (kepala pemerintahan) memerintahkan semua samurai dan *daimyo* (penguasa daerah) untuk menerima *bonds* (surat berharga obligasi) dan pembayaran sekaligus (*lump sum*) pengganti pensiun tahunan. Obligasi pengganti pensiun yang diberikan kepada mantan samurai ini diberikan bunga sebesar 6%. Sebagian besar surat obligasi ini oleh para mantan samurai digunakan untuk memodali bank baru yang menawarkan keuntungan yang lebih baik. Untuk sementara pemerintah

---

98

[2] Joyce C. Lebra, Okuma Shigenobu (Canberra, 1973), hal. 29

terlepas dari beban tahunan dan semua pensiunan menjadi pemegang *bonds* (surat berharga obligasi) pengganti pensiun[3].

Data-data statistik mengenai anggaran negara, peredaran uang, harga-harga, upah, tingkat bunga, dan produk nasional kurang cukup dapat diandalkan dan akurat serta kurang lengkap, kadang terlalu bertentangan untuk memungkinkan sebuah analisa dari akibat atas perubahan-perubahan tersebut, terutama jika menyangkut pergerakan-pergerakan jangka pendek. Misalnya pada April 1873 Wakil Menteri Keuangan Inoue Kaoru (akhirnya mengundurkan diri di tahun yang sama) menghitung bahwa pengeluaran biaya negara sebesar ¥50 juta dan pendapatannya hanya ¥40 juta dengan hutang negara sebesar ¥140 juta. Sedangkan Okuma Shigenobu berpendapat bahwa berdasarkan perbedaan pada perhitungan harga beras, pendapatan negara adalah sebesar ¥48 juta dan pengeluarannya sebesar ¥46 juta[4]. Hal ini mengakibatkan pemerintahan pada periode awal Restorasi Meiji sangat sulit untuk membuat dan mengontrol anggaran negara. Baru pada 9 Juni 1873 anggaran nasional pertama mulai dipublikasikan oleh Okuma Shigenobu.

Permasalahan keuangan yang terjadi pada periode awal Restorasi Meiji adalah menyediakan dana untuk program modernisasi Jepang, misalnya untuk perusahaan baru

---

[3] *Ibid.*, hal. 30

Mitsubishi dengan memberikan subsidi tahunan sebesar ¥250.000,- untuk pengembangan usaha ekspedisi dan tranportasi laut, pinjaman sebesar ¥810.000,- untuk membeli 6 kapal dari perusahaan Pacific Mail, dan ¥15.000,- untuk membuka sekolah perdagangan pelayaran[5].

Untuk mendorong industri Okubo Toshimichi dan Okuma Shigenobu juga menaruh perhatian terhadap permasalahan kurangnya *reserves for paper currency* (cadangan uang kertas). Mereka mengusulkan pendirian *Bureau of Loans* (Biro Peminjaman) yang mengeluarkan modal khusus (yang dapat ditukar dengan mata uang biasa). Untuk usulan ini dicadangkan ¥1 juta setiap tahunnya dalam jangka waktu 30 tahun[6].

Masalah keuangan lain yang timbul adalah dengan kebangkrutan *Ono and Shimada Bank* dan arus keluarnya emas dan perak dari Jepang. Dengan ini Januari 1875 Okuma Shigenobu mengajukan usulan pengembangan industri jangka panjang, pengenaan pajak ganda bagi importir dan distributor barang-barang impor, subsidi dan fasilitas lain untuk industri dalam negeri, manajemen pemerintah dalam transportasi, mendorong pertanian dan perkebunan, dan pendirian Departemen Perdagangan.

---

[4] *Ibid.*, hal. 23
[5] *Ibid.*, hal. 29
[6] *Ibid.*, hal. 30

Perdagangan bebas yang diterapkan telah mendorong masuknya barang-barang konsumsi dari luar negeri. Barang-barang tersebut masuk dengan harga yang lebih murah (barat mendapatkan kemudahan dan fasilitas), sehingga menyaingi dan bahkan mematikan hasil produksi dan industri dalam negeri, sebagai contohnya adalah karena murahnya tekstil dari Inggris akhirnya mematikan industri tekstil (kerajinan tangan) dalam negeri. Kondisi ini menyebabkan nilai impor menjadi lebih besar dari ekspor. Murah dan mudahnya barang impor masuk karena tarif biaya masuk yang diterapkan pemerintah sangat rendah. Adanya tujuan pemerintah menerapkan alih teknologi barat untuk mendukung program modernisasi.

Akibat matinya industri-industri dalam negeri menyebabkan banyak buruh dan pengrajin yang dipecat, saudagar-saudagar yang sebelumnya mempunyai hak-hak istimewa dan hak monopoli untuk perdagangan hasil-hasil panen beras yang dikirim dan dijamin oleh para *daimyo* harus kehilangan pekerjaan terutama seiring dengan dihapusnya sistem feodal.

Hutang kepada asing untuk membiayai program modernisasi ini termasuk biaya mendatangkan tenaga ahli dari barat dan pengiriman delegasi ke barat untuk belajar, serta mendatangkan peralatan-peralatan dan permesinan-permesinan

untuk industrialisasi dibayar dengan memberikan kemudahan-kemudahan dan fasilitas-fasilitas yang akhirnya memacu meningkatnya impor barang-barang konsumsi.

Pembayaran atas barang-barang impor yang menggunakan emas telah mendorong arus keluarnya emas dari Jepang dan masuknya perak secara besar-besaran[7], karena pada saat itu Jepang menggunakan standar perak dalam penentuan nilai tukarnya. Hal ini telah menyebabkan merosotnya cadangan emas di dalam negeri. Di dalam negeri Jepang nilai perak lebih tinggi dari nilai emas, sedangkan di luar negeri berlaku sebaliknya dengan penemuan perak besar-besaran di Amerika[8]. Pada tahun 1875 karena tingkat nilai tukar perak di Jepang tetap sama, uang logam perak didatangkan untuk ditukar dengan uang logam emas, sehingga terjadi pengaliran arus emas dari Jepang. Untuk menanggulanginya pemerintah menyetujui penggunaan uang logam perak secara tidak terbatas, dan secara *de facto* mengakui standar perak[9].

Kesulitan pada mata uang dan nilai tukar selain dari penggunaan standar perak di Jepang ini juga disebabkan karena beredarnya lebih dari satu jenis mata uang di Jepang, karena tiap-tiap daerah berhak mengeluarkan mata uang sebagai nilai

---

[7] Yoshihara Kunio, *op.cit.*, hal. 2
[8] *Ibid.*
[9] *Ibid.* hal. 3

tukarnya[10]. Walaupun mata uang yen telah diperkenalkan tetapi masih belum dapat dilaksanakan sepenuhnya.

Permasalahan keuangan di Jepang semakin rumit dengan adanya Pemberontakan Satsuma (*Seinan Senso*) pada tahun 1877 yang disebabkan oleh program penghapusan feodal. Pemerintah harus mencari dana untuk mengirim 65.140 pasukan yang terdiri dari pasukan infanteri, ahli mesin, kendaraan perang, dan polisi untuk melawan sekitar 20.000 atau 22 ribu pasukan pemberontak dalam peperangan yang berlangsung selama tujuh setengah bulan dengan biaya £8,4 juta[11]. Atau menurut Joyce C. Lebra, dalam Okuma Shigenobu chapter 2, hal. 31, biaya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk menumpas pemberontakan ini adalah sebesar ¥42 juta. Untuk mendanai ini pinjaman dari masyarakat tidak dapat terwujud dan pinjaman dari luar negeri tidak mungkin karena investor asing tidak setuju dengan resiko besar yang akan ditanggungnya. Pada akhirnya pemerintah bernegosiasi dengan *Fifteenth Bank* dan meminjam ¥15 juta. Kekurangan ¥27 juta diatasi dengan mengeluarkan *irredeemable paper money* (uang kertas yang tidak dapat dipertukarkan) seperti yang disarankan oleh Matsukata Masayoshi. Pengeluaran *irredeemable paper money* (uang kertas yang tidak dapat dipertukarkan) ini telah mengakibatkan terjadinya inflasi. Hal ini

---

[10] *Ibid.*

memperlihatkan bahwa pemerintah tidak dapat memenuhi kebutuhannya dan keadaaan ini dipersulit dengan pengurangan pajak atas tanah di bulan February dari 3% menjadi 2,5% dari nilai tanah yang dilakukan untuk menanggapi pemberontakan petani[12].

Sistem perbankan yang diterapkan saat itu adalah bahwa bank-bank nasional berhak mengeluarkan uang kertas yang tidak dapat ditukarkan atau surat hutang sendiri (*inconvertible notes* atau *bonds*), terutama dimanfaatkan untuk membiayai operasi untuk menumpas Pemberontakan Satsuma (*Seinan Senso*). Kondisi ini menyebabkan pengeluaran surat berharga besar-besaran oleh bank-bank nasional yang mengawali timbulnya inflasi. Pada akhir 1878 obligasi pemerintah dan bank mencapai lebih dari ¥150 juta dibandingkan dengan ¥95 juta pada Juni 1876. Hutang pemerintah dari ¥55 juta pada Juni 1876 menjadi lebih dari ¥254 juta pada tahun 1878 bulan yang sama. Bagian terbesar dari kenaikan ini adalah pengeluaran obligasi dana pensiun dan pinjaman yang diberikan oleh *Fifteenth Bank* kepada pemerintah.

Kondisi tersebut menyebabkan harga-harga naik secara tajam, tingkat suku bunga naik sementara itu nilai obligasi

---

[11] August H. Mounsey, The Satsuma Rebellion (London, 1979), hal. 249
[12] Roger W. Bowen, Rebellion and Democracy in Meiji Japan (University of California Press, 1980), hal. 94

pemerintah turun, indeks harga komoditas meningkat, yang berarti peningkatan pendapatan petani. Meningkatnya pendapatan ini mempengaruhi peningkatan pada pembelanjaan barang-barang konsumsi yang berarti pula mempengaruhi peningkatan perusahaan produksi dan perdagangan. Situasi semacam ini hanya dinikmati oleh pemilik tanah saja, bukan petani penyewa atau buruh upahan yang bergaji rendah.

Sebagai contoh adalah petani sutera dan keluarganya menikmati kebangkitan baru kemakmuran, sebab produk mereka merupakan sumber pendapatan utama dari seluruh nilai ekspor pada masa Restorasi Meiji. Contoh yang lain tidak hanya petani sutera yang mendapatkan keuntungan sejak setelah terjadinya Pemberontakan Satsuma (*Seinan Senso*) antara 1877 - 1880, yaitu produsen katun dan petani beras. Produsen katun telah meningkat produksinya dengan nilai 28% dari pasar dan petani beras menikmati nilai 2 kali dari panen mereka. Indikasi yang lain dari kemakmuran ini adalah pertumbuhan masyarakat produksi di Chichibu dan tempat-tempat lain yang telah dibentuk untuk program modernisasi dan peningkatan produksi. Untuk pembentukan program ini kebanyakan petani ditekan untuk meminjam atau berhutang dari pemerintah atau lembaga peminjaman swasta[13].

---

[13] *Ibid.*, hal. 95

Adanya insiden peningkatan kekerasan yang melatarbelakangi beberapa depresi atau tekanan ekonomi, yang semuanya telah menimbulkan kesulitan sejak 5 tahun anggaran (1878 – 1882) adalah merupakan periode kemakmuran semu. Pemerintah menyadari bahwa banyak dari peningkatan kekayaan di beberapa bagian negara hanya semu, hal tersebut adalah merupakan keuntungan untuk penduduk pertanian jangka pendek dan melahirkan inflasi, ini merusak dasar-dasar atau sendi-sendi pendirian industri yang kuat untuk jangka panjang dan modernisasi ekonomi. Banyak terjadi kebangkrutan pada sektor-sektor industri dalam negeri terutama perusahaan-perusahaan yang dioperasikan pemerintah.

Untuk alasan tersebut Matsukata Masayoshi menerapkan kebijakan deflasi setelah diangkat menjadi Menteri Keuangan pada akhir tahun 1881 yang bertujuan untuk mengurangi depresi ekonomi dan menguatkan ekonomi Jepang yang tidak stabil yang ditimpa oleh buruknya nilai tukar dan kepercayaan masyarakat yang berlebihan terhadap barang-barang impor[14].

1.2. Permasalahan

Permasalahan yang diangkat pada penulisan ini adalah pengaruh dan langkah-langkah kebijakan deflasi yang diterapkan Menteri Keuangan Matsukata Masayoshi pada akhir tahun 1881

---

[14] *Ibid.*, hal. 93

untuk mengatasi krisis ekonomi atau inflasi yang terjadi pada periode awal Restorasi Meiji terhadap perekonomian Jepang.

1.3. Tujuan

Tujuan penulisan masalah ini adalah untuk mengetahui masalah yang melatarbelakangi pengambilan Kebijakan Deflasi Menteri Keuangan Matsukata Masayoshi pada masa Restorasi Meiji, langkah-langkah yang diambil untuk melaksanakan kebijakan tersebut, dan pengaruh dari kebijakannya terhadap perekonomian Jepang.

1.4. Ruang Lingkup Penulisan

Dimulai dari penghapusan sistim feodal pada tahun 1871, yang merupakan salah satu penyebab terjadinya Pemberontakan Satsuma (*Seinan Senso*) yang dipimpin oleh Saigo Takamori pada tahun 1877, pengangkatan Matsukata Masayoshi sebagai Menteri Keuangan bulan Oktober 1881 dan langkah-langkah yang diambilnya guna menanggulangi krisis ekonomi yang terjadi pada periode awal Restorasi Meiji di Jepang atau kebijakan deflasi yang diambilnya, sampai dengan pengaruhnya pada perekonomian Jepang.

1.5. Metode Penulisan

Metode penulisan dalam skripsi ini adalah metode kepustakaan, dimana penulis mencari data dan keterangan dari buku-buku yang berhubungan dengan Matsukata Masayoshi dan

kondisi perekonomian Jepang sebelum dan sesudah pengangkatannya sebagai Menteri Keuangan Jepang pada masa Restorasi Meiji tahun 1881.

1.6. Sistematika Penulisan

Bab I. Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang penulisan terjadinya krisis ekonomi atau keuangan, permasalahan, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, metode penulisan, dan yang terakhir mengenai sistematika penulisan.

Bab II. Penulis ingin membahas tentang kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Menteri Keuangan Matsukata Masayoshi:

2.1. Kebijakan dalam bidang moneter dan perbankan

2.2. Kebijakan dalam bidang perdagangan dan perindustrian

Bab III. Pada bab ini penulis ingin membahas tentang pengaruh kebijakan deflasi yang diambil oleh Menteri Keuangan Matsukata Masayoshi:

3.1. Pengaruh dan hasil yang dicapai terhadap perekonomian Jepang secara makro di bidang moneter dan perbankan.

3.2. Pengaruh dan hasil yang dicapai terhadap perekonomian Jepang secara mikro di bidang perdagangan dan perindustrian.

3.3. Pengaruh pada perekonomian jangka panjang.

Bab IV. Penutup, kesimpulan dari keseluruhan bab.